

PENEGAKKAN SYARIAT ISLAM DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)

(Kritik Terhadap Qanun-Qanun)

Syarifuddin¹

Abstract

From the past, the majority of the Indonesian people wish the system of laws which lead to the application of syari'ah (Islamic laws). In Aceh, for example, people untiringly struggle for the implementation of syariat Islam in all aspects of life. Based on some considerations, the government recognized Aceh as the area in which Syariat Islam is implemented. Apart from the strengths and the weaknesses of Syari'at Islam, some qanuns (special term for Islamic laws) appear to regulate the life of the local community. However, in some other parts of Indonesia, the people are only satisfied with the current laws without being governed by new one.

The phenomenon as occurring Aceh, if it is seen from the Islamic political-law perspective, is a backward step. The direction of Islamic political law tends to be substantive and rather than surface. However, The need of arising syari'at Islam in a more formal form should be respected because not all people or region have the tendency or awareness to practice their religions. The majority of the people of Aceh wish local laws to maintain the Islamic noble values that they possess so far. Without having local laws, it is feared that the Islamic values fade in line with the arrival of the influence of globalization era.

Keywords: Syariat Islam, Undang-Undang, Qanun

¹ Dosen pada Jurusan Syari'ah STAIN Palangka Raya

A. PENDAHULUAN

Sejak Indonesia merdeka, isu keinginan sebagian besar masyarakat muslim agar *syariat Islam* (hukum Islam) ditegakkan di negeri ini sudah lama terdengar (hamid, 2007:57). Paling tidak pada awal pembentukan Dasar Negara Republik Indonesia, kata *syariat Islam* telah dimunculkan dalam Piagam Jakarta (Anshari, 2000: tth). Namun kemudian kata tersebut dihilangkan dengan beberapa pertimbangan dari para *founder father* negeri ini. Meskipun demikian gairah atau semangat untuk tetap melaksanakannya selalu menyala baik secara formal maupun non formal. Sebutlah Nangroe Aceh Darussalam misalnya menginginkan pelaksanaan *syariat Islam* ditetapkan secara legal formal, sementara di beberapa daerah sudah cukup puas dengan adanya jaminan kebebasan menjalankan agama sesuai keyakinan yang dianutnya.

Datangnya era reformasi berdampak positif pada tatanan hukum nasional. Dalam era ini upaya pembentukan sistem hukum nasional semakin digalakkan. Dengan disahkannya amandemen ketiga UUD 1945 pada tanggal 10 Nopember 2001, maka tata hukum Indonesia mengalami perubahan yang signifikan, termasuk dalam hal ini hukum Islam.

Pelaksanaan hukum Islam pasca reformasi tidak lepas dari semangat otonomi dan desentralisasi dari pusat ke daerah. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU no. 22 1999 tentang peraturan daerah, kekuasaan peradilan termasuk urusan yang ditentukan sebagai kewenangan pemerintah pusat, namun dalam hubungannya dengan materi hukum dan budaya hukum tidak ada ketentuan yang menegaskan keharusan untuk bersifat seragam di seluruh Indonesia.

Dalam pasal 18 ayat (5) perubahan kedua UUD 1945 dinyatakan: "Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pusat". Dalam ayat (6) dinyatakan pula: "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan". Dan bahkan dalam pasal 18B ayat (1) dinyatakan: "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang". Dalam ayat (2) dinyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionlnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang (Fanani, 2008:144).

Atas dasar ini, maka Aceh merupakan propinsi terdepan dan pertama yang menerapkan sistem hukum Islam (*syariah*). Lahirnya undang-undang no. 44 Tahun 1999 menyebutkan empat keistimewaan yang dimiliki Aceh. *Pertama*,

penerapan *syariat Islam* di seluruh aspek kehidupan beragama; *kedua*, penggunaan kurikulum pendidikan berdasarkan syariat Islam tanpa mengabaikan kurikulum umum; *ketiga*, pemasukan unsur adat dalam struktur pemerintahan desa; dan *keempat*, pengakuan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah (Santoso, 2003:109).

Melalui UU no. 44 ini pula penyelenggaraan Propinsi NAD meliputi empat bidang yaitu; (1) Penyelenggaraan kehidupan beragama. (2) Penyelenggaraan kehidupan adat. (3) Penyelenggaraan pendidikan. dan (4) Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Terkait dengan UU tersebut muncullah UU no. 18/2001 tentang Otonomi Khusus NAD. Akibatnya muncullah peluang untuk melaksanakan syariat Islam di Aceh meskipun tetap dalam bingkai hukum Nasional Indonesia (Azra dalam Muhammad, 2003: xii)

Namun seiring dengan perjalanannya yang belum begitu mulus, hingga saat ini aplikasi *syariat Islam* di Aceh masih menimbulkan berbagai permasalahan dan kendala yang akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

B. PEMBAHASAN

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikenal dengan sebutan sebagai serambi Mekkah. Penyebutan ini tidak terlepas dari kuatnya pengaruh nilai-nilai Islam yang diwariskan nenek moyang mereka yang pernah memerintah pada masa kerajaan Islam di Aceh. Oleh karena itu tidak heran bila keinginan masyarakatnya untuk menerapkan sistem syariat Islam di wilayah ini diberbagai lini kehidupan sangat kuat. Namun keinginan tersebut terkendala dengan berbagai kebijakan pemerintahan orla dan orde baru yang tidak memberi ruang dan kesempatan dalam pelaksanaannya. Akibatnya sering terjadi konflik kepentingan antara daerah dengan pemerintah.

Pada 1948, Soekarno mengunjungi Aceh untuk memperoleh pengakuan masyarakat dalam memperjuangkan pengakuan indepedensi Indonesia. Beureueh, setelah berhasil menghimpun dana untuk perjuangan RI, memohon kepada Soekarno agar mengizinkan diberlakukannya syariat Islam di Aceh. Usul tersebut disetujui, tetapi beliau tidak bersedia menandatangani surat persetujuan yang disodorkan Beureueh (Kaoy Syah dan Hakim, 2003: 3).

Sekalipun secara fisik pembangunan terlihat mulai berjalan selama ini, tetapi rakyat Aceh tidak merasa dilibatkan dalam putaran roda pembangunan. Mereka terasing dari hiruk pikuk pembangunan. Dalam setuasi semacam inilah GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang telah ditumpas, kembali mendapat tempat dihati rakyat pada akhir 1980-an, suatu konflik kembali merebak di Aceh, Pemerintah mengerahkan militer secara berlebihan untuk melakukan Operasi Jaringan

Merah. Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), dan sejumlah pembantaian yang tidak mengindahkan HAM terjadi. Tetapi, tindakan represif yang brutal dari militer itu tidak menyurutkan semangat juang rakyat Aceh (Amal dan Panggabean, 2004: 15).

Ketika angin reformasi bergaung di bumi Indonesia, hal tersebut membuka jalan bagi masyarakat Aceh untuk kembali menuntut pemberlakuan syariat Islam yang pernah diperjuangkan sebelumnya. Pada 13 Januari 1999, Angkatan Intelektual Darussalam mengeluarkan pernyataan politik yang menghimbau dilaksanakannya referendum di Aceh untuk menyelesaikan konflik. Tuntutan yang sama juga terjadi pada 31 Januari-4 Februari 1999 oleh Kongres Mahasiswa dan Pemuda Aceh Serantau (Amal dan Panggabean, 2004: 25).

Tampaknya tuntutan tersebut tidak sia-sia, hal ini tampak dengan dikeluarkannya UU no.44 Tahun 1999 yang disambut gembira oleh kalangan pendukung penerapan syariat Islam. Karena dari sinilah serangkaian peraturan daerah seperti perda no. 3/2000 tentang Majelis permusyawaratan Ulama, perda no. 5/2000 tentang pelaksanaan syariat Islam. Perda no. 6/2000 tentang penyelenggaraan pendidikan. Perda no. 7/2000 tentang penyelenggaraan ada serta perda-perda yang bernuansa Islam lainnya (Amal dan Panggabean, 2004: 26).

Tetapi, langkah perundangan no. 44/1999 ini ternyata belum mampu meredam gejolak di Aceh. Tuntutan referendum semakin gencar dilakukan. Dua tahun kemudian pemerintah pusat mengeluarkan UU no. 18/2001 tentang propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang mengatur lebih jauh otonomi khusus bagi NAD seperti Mahkamah Stariah, qanun, lambang daerah dan lain-lain (Amal dan Panggabean, 2004: 27).

UU NAD ini, diundangkan pada 9 Agustus 2001, yang melatari kesibukan eksekutif dan legislatif Aceh dalam merancang sejumlah qanun untuk mengimplementasikan syariat Islam dalam bentuk yang luas (Islam yang *kaffah*).

1. Tinjauan *Qanun-Qanun* Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam

Sepanjang tahun 2002 hingga akhir 2003, DPRD NAD berhasil menetapkan sejumlah qanun yang kemudian diundangkan dalam tahun-tahun tersebut. Berikut adalah tinjauan beberapa qanun propinsi NAD yang bertalian dengan upaya penerapan syariat Islam di daerah tersebut.

a. *Qanun* no. 10/2002 tentang Peradilan Syariat Islam

Qanun ini merupakan upaya mengejawantahkan salah satu kekhususan Aceh yang diatur secara umum dalam pasal 1 ayat 7, pasal 25-26 UU no. 18/2001. Ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut, *misalnya*” kewenangan

Mahkamah Syariah... didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional (Dinas Syariat Islam NAD, 2004:107).

Qanun yang disahkan pada 14 Oktober 2002 dan diundangkan 6 januari 2003 memuat 7 bab. Bab pertama, tentang ketentuan umum; bab kedua tentang susunan mahkamah; bab ketiga tentang kekuasaan dan kewenangan mahkamah, bab keempat tentang hukum material dan formil; bab kelima ketentuan-ketentuan lain; bab keenam tentang ketentuan peralihan dan bab ketujuh tentang ketentuan penutup.

b. *Qanun* no. 11/2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

Qanun bidang ini disahkan pada 14 Oktober 2002 dan diundangkan pada 6 januari 2003. Kandungan utamanya adalah berupaya memilah dan mengelaborasi lebih jauh peraturan daerah no. 5/2000 tentang pelaksanaan syariat Islam. Dalam qanun no. 11/2002, pelaksanaan syariat Islam dibatasi pada bidang akidah, Ibadah dan syiar Islam. Sebagaimana perda no. 5/2000, qanun ini mendefinisikan syariat Islam dalam pengertian luas: “*Syariat Islam* adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan” (pasal 1 ayat 6). Akidah didefinisikan sebagai akidah menurut paham “*ahlussunnah wal jamaah*” (pasal 1 ayat 7), dan ibadah dibatasi pada shalat dan puasa di bulan Ramadhan (pasal 1 ayat 8) (Dinas Syariat Islam NAD, 2004:141).

Pengaturan ketiga bidang ini dimaksudkan untuk:

1. Membina dan memelihara keimanan dan ketakwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran sesat;
2. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ibadah serta penyediaan fasilitasnya;
3. Menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana lingkungan yang Islami;

Sementara dalam pasal 3, fungsinya ditetapkan sebagai “pedoman pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam”.

Pasal 4-5 menetapkan kewajiban memelihara akidah Islam, melarang menyebarkan paham atau aliran sesat serta larangan keluar dari akidah Islam (murtad) dan/atau menghina atau melecehkan agama Islam. Implimentasi hukumnya diatur dalam pasal 20 yakni ketentuan *ta'zir* berupa penjara 2 tahun atau cambuk 12 kali untuk upaya penyebaran paham atau aliran sesat. Sementara bagi yang murtad atau menghina atau melecehkan agama Islam dinyatakan akan diatur dalam *qanun* tersendiri.

Pasal 6 menyerahkan kewenangan penetapan aliran/paham sesat kepada fatwa MPU Propinsi NAD. Dalam penjelasan pasal 2, paham sesat didefinisikan

sebagai “pendapat-pendapat tentang aqidah yang tidak didasarkan kepada al-Quran atau hadis yang sahih atau penafsiran yang tidak memenuhi persyaratan metodologis atau kedua sumber tersebut...”

Kewajiban menjalankan ibadah dalam qanun ini meliputi shalat fardhu, shalat jumat dan puasa (bab IV). Bagi yang melanggar akan mendapat hukuman *ta'zir* berupa penjara 6 bulan atau cambuk 3 kali untuk yang tidak menjalankan shalat jumat tiga kali berturut-turut tanpa halangan *syar'i* (pasal 21 ayat 1). Hukuman pencabutan izin usaha untuk perusahaan angkutan yang tidak memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penumpangnya untuk melakukan shalat fardhu (pasal 21 ayat 2). Dipenjara 1 tahun atau denda Rp. 3 Juta atau cambuk 6 kali dan pencabutan izin usaha untuk penyedia fasilitas/peluang kepada kaum muslimin untuk tidak berpuasa tanpa halangan *syar'i* (pasal 22 ayat 1). Penjara 4 bulan atau cambuk 2 kali untuk yang makan minum di muka umum pada siang hari bulan ramadhan (pasal 22 ayat 2).

Qanun ini juga menetapkan ketentuan tentang busana Islami (pasal 13) – dijelaskan sebagai “pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh”. Sementara hukuman untuk yang melanggarnya adalah dipidana dengan hukuman *ta'zir* setelah melalui proses peringatan dan pembinaan oleh *Wilayatul Hisbah*, yakni badan yang mengawasi pelaksanaan syariat Islam (pasal 1 ayat 11).

c. *Qanun* no. 12/2003 tentang Larangan Minuman Khamar dan sejenisnya.

Qanun ini disahkan pada 15 Juli 2003 dan diundangkan pada 16 Juli 2003. Dalam qanun ini yang dimaksudkan dengan khamar dan sejenisnya “adalah minuman yang memabukkan, apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran daya berpikir” (pasal 1 ayat 20). Pasal 2 menyebutkan bahwa larangan minuman khamar dan sejenisnya mencakup “segala bentuk kegiatan dan/ atau perbuatan yang berhubungan dengan segala minuman yang memabukkan. Adapun tujuan pelarangannya adalah melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan merusak akal, mencegah terjadinya perbuatan atau kegiatan yang timbul akibat minum khamar dalam masyarakat, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan minuman khamar dan sejenisnya (pasal 3) (Dinas Syariat Islam NAD, 2004:279).

Dalam pasal 4 ditetapkan bahwa minuman khamar dan sejenisnya adalah haram, dan setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya (pasal 5). Begitu pula pasal 6 ayat 1, “setiap orang atau badan hukum dan badan usaha dilarang memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan,

menghadiahkan dan mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya. Larangan yang hampir serupa terdapat pula pada pasal 6 ayat 2, dan pasal 7 dan 8.

Bagi yang melanggar pasal 5 di atas, maka pasal 26 menetapkan bahwa sanksi hukuman yang diberikan adalah hukuman *hudud* 40 cambukan. Pelanggaran pasal 6-8 hukumannya adalah *uqubat ta'zir* berupa kurungan paling lama 1 tahun dan paling singkat 3 bulan atau denda maksimal Rp. 75 juta dan minimal Rp. 25 juta. Bagi yang mengulangi perbuatannya hukumannya dapat ditambah sepertiga dari *uqubat* maksimal (pasal 29).

d. *Qanun* no. 13/2003 tentang maisir (perjudian).

Qanun ini disahkan pada 15 Juli 2003 dan diundangkan pada 16 Juli 2003. Menurut *qanun* ini perjudian atau *maisir* diartikan sebagai “kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran” (pasal 1 ayat 20). Cakupan larangan maisir adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang-orang/lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut (Dinas Syariat Islam NAD, 2004:299).

Dalam pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pelarangan adalah memelihara dan melindungi harta benda/kekayaan, mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah *maisir*, melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat kegiatan dan/atau perbuatan *maisir*, serta meningkatkan peranserta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perbuatan maisir.

Qanun ini mengharamkan maisir (pasal 4) dan melarang setiap orang melakukannya (pasal 5). Begitu juga pelarangan terhadap badan hukum yang melakukannya atau melindunginya (pasal 6 ayat 1-2). Instansi pemerintah dilarang memberi izin penyelenggaraan *maisir* (pasal 7) dan kewajiban setiap orang/kelompok, institusi masyarakat untuk mencegahnya (pasal 8) dan melaporkannya kepada pejabat yang berwenang secara lisan atau tertulis (pasal 9).

Pelanggaran terhadap pasal 5 diancam *uqubat* berupa cambuk di depan umum maksimal 12 kali, minimal 6 kali (pasal 23 ayat 1). Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha non pemerintah yang melanggar pasal 6 dan 7 diancam dengan *uqubat* atau denda maksimal Rp. 35 juta, minimal Rp. 15 juta (pasal 23 ayat 2).

Sehubungan dengan pelaksanaan hukuman, dalam pasal 30 disebutkan bahwa hukuman cambuk dilaksanakan dengan menggunakan rotan sepanjang 1 m, diameternya antara 0.75 – 1 cm dan tidak mempunyai ujung ganda. Hukuman dilakukan di depan umum dengan disaksikan banyak orang dan dihadiri jaksa serta dokter yang ditunjuk. Kadar cambukan adalah “tidak melukai” serta

dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan. Bagi laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga dan tanpa diikat dengan mengenakan baju tipis yang menutup aurat. Sedang perempuan dicambuk dalam posisi duduk dan ditutupi kain di atasnya. Bila dia hamil, pencambukan dilakukan 60 hari setelah melahirkan. Dalam pasal 31 disebutkan apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhitung berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka pencambukan dapat ditunda dan sisanya akan dilakukan di lain waktu yang memungkinkan.

Bab 5, tentang pengawasan dan pembinaan serta bab 6 tentang penyidikan dan penuntutan memiliki kandungan yang senada dengan dua *qanun* sebelumnya yakni *qanun* no. 11 dan 12 di atas.

e. *Qanun* no. 14/2003 tentang *Khalwat* (mesum)

Khalwat didefinisikan dalam *qanun* ini adalah sebagai perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan (pasal 1 ayat 20). Cakupannya meliputi segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina (pasal 2). Tujuan pelarangannya adalah untuk menegakkan syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan /atau perbuatan yang merusak kehormatan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan *khalwat/mesum* dan menutup peluang terjadinya kerusakan moral (pasal 3) (Dinas Syariat Islam NAD, 2004:318).

Qanun ini disahkan pada 15 Juli 2003 dan diundangkan pada 16 Juli pada tahun yang sama dan menetapkan *khalwat/mesum* hukumnya haram (pasal 4). Setiap orang dilarang melakukannya (pasal 5). Begitu juga setiap orang atau kelompok, aparat pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan kemudahan atau fasilitas atau melindungi orang yang berbuat mesum (pasal 6). Setiap individu maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan mesum (pasal 7).

Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 4, diancam dengan *uqubat ta'zir* berupa cambuk paling banyak 9 kali, paling sedikit 3 kali atau denda maksimal Rp.10 juta dan minimal Rp. 2,5 juta (pasal 22 ayat 1). Sementara yang mencederai pasal 5 diancam *uqubat* berupa kurungan paling lama 6 bulan, paling singkat 2 bulan, atau denda maksimal Rp. 15 juta dan minimal Rp. 5 juta (pasal 22 ayat 2). Bagi yang melanggar lebih dari satu kali, maka hukumannya di tambah 1/3 dari hukuman maksimal (pasal 24). Pelaksanaan hukuman cambuk dalam *qanun khalwat/mesum* serupa dengan ketentuan yang ada dalam *qanun maisir*. Demikian pula ketentuan dalam bab 5 tentang pengawasan dan pembinaan serta bab 6 tentang penyidikan dan penuntutan senada dengan *qanun-qanun* sebelumnya.

2. Kritik terhadap *Qanun-Qanun* Aceh

2.1. *Qanun* no. 10/2002 tentang Peradilan Syariat Islam

Secara keseluruhan, berbagai ketentuan yang dirumuskan dalam qanun ini melampaui dari kewenangan kompetensi pengadilan agama yang lazim dalam masalah keperdataan. Bahkan secara umum ketentuan dalam qanun peradilan syariat juga berseberangan dengan UU no. 7/1998 tentang Peradilan Agama, dalam kasus seperti: Semua pengadilan di Indonesia adalah pengadilan negara yang harus dibentuk dengan UU. Dalam UU pembentukannya, semua kewenangan, personalia maupun acara dapat dicantumkan (lihat UU no. 14/1970, UU no. 14/1985 dan UU no. 7/1989). Dengan demikian, pembentukan Mahkamah Syariat, yang kewenangannya melampaui atau lebih luas dari peradilan agama, harus dibentuk dengan UU, bukan dengan perda atau qanun. Begitu juga pengembangan peradilan agama kepada peradilan syariat seperti yang dinyatakan dalam qanun ini (pasal 2 ayat 3), juga mesti ditetapkan dengan UU, bukan dengan qanun.

2.2 *Qanun* no.11/2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

Pada pasal 6 tentang penyerahan penetapan aliran/paham sesat kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dalam qanun ini yang dimaksud dengan aliran/paham sesat tidak didefinisikan secara jelas. Begitu pula adanya beberapa ketentuan bagi pelanggaran seperti tidak melaksanakan shalat jumat sebanyak 3 kali berturut-turut tanpa halangan syar'i mendapat sanksi cambukan 3 kali atau penjara selama 6 bulan. Tapi anehnya hukuman yang tidak melaksanakan shalat fardhu atau berpuasa tanpa halangan tidak ada ketetapanannya. Padahal 2 rukun Islam ini tidak kalah pentingnya dengan rukun Islam lainnya dan bahkan shalat fardhu menjadi hal yang pokok dalam Islam yakni sebagai tiang agama.

2.3 *Qanun* no. 12/2003 tentang larangan Minuman Khamar dan Sejenisnya

Ambisi qanun ini adalah larangan menyeluruh, tidak sebatas konsumsi khamar dan sejenisnya, tetapi juga pelarangan dari memproduksi, menyediakan, menjual dan proses kegiatan yang terkait dengan minuman khamar. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga Aceh, baik muslim maupun non muslim seperti tampak pada pasal 6 ayat 1. Penerapan secara menyeluruh ini tentu mendapat hambatan atau kendala dari warga masyarakat yang bukan muslim. Seyogyanya pasal ini hanya berlaku bagi penganut agama Islam saja. Sedangkan pelarangan bagi warga non muslim diatur berdasarkan perda yang tidak dihubungkan dengan hukum Islam sehingga tidak terjadinya benturan kepentingan antara Islam dan non Islam.

C. PENUTUP

Demikian sekilas pelaksanaan hukum Islam di Aceh. Dapat disimpulkan, bahwa syariat Islam di sini berangkat dari paradigma fiqh klasik. Syariat Islam adalah materi fiqh dalam kitab fiqh. Syariat Islam belum berangkat dari definisi baru, rekonstruksi fiqh dari perwujudan titah Allah menjadi produk manusia yang tidak melanggar *hudud* Allah.

Fenomena seperti di Aceh ditinjau dari perspektif politik hukum Islam Indonesia, sesungguhnya sebuah langkah mundur. Arah politik hukum Islam selama ini lebih bersifat substantif dan bukan mementingkan kulit. Umat Islam tidak perlu berkoar-koar dengan menyebut syariat Islam, tapi perlu mengupayakan agar jiwa hukum nasional adalah ajaran Islam. Namun pada sisi lain, keinginan untuk memunculkan syariat Islam dalam bentuk lebih formal juga perlu dihargai sebab tidak semua orang atau daerah memiliki kecenderungan dan kesadaran untuk mengamalkan agamanya. Aceh misalnya, mayoritas warganya menginginkan perlunya perda untuk mempertahankan nilai-nilai luhur keislaman yang selama ini mereka miliki. Tanpa adanya perda dikhawatirkan nilai-nilai tersebut akan luntur seiring masuknya pengaruh perkembangan global dunia.

Hanya saja disayangkan *qanun-qanun* yang diberlakukan masih berkutat pada masalah ibadah *mahdhah* dan belum menyentuh permasalahan yang lebih konkret di tengah masyarakat, seperti KKN, pengangguran, kemiskinan, ketidakadilan ekonomi, politik dan hukum.

Begitu pula kendala yang terpenting adalah masih banyaknya istilah-istilah yang longgar dan tidak terdefinisikan secara spesifik seperti istilah *kaffah*, *ahlus sunnah wal jamaah*, dan muamalah yang belum diperinci unsur-unsurnya secara lebih spesifik. *Wallahu a'lam*

DAFTAR RUJUKAN

- Anshari, Endang Saifuddin. 2000. *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus nasional Antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Amal, Taufik Adnan dan Samsu Rizal Panggabean. 2004. *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*. Cet.1, Ciputat: Pustaka Alvabet.
- Fanani, Muhyar. 2008. *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*. Tiara wacana: Yogyakarta.
- Hamid, Arifin. 2007. *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia: Perspektif Sosio-Yuridis* Cet. 1; Jakarta: eLSAS
- Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam. 2004. Dinas Syariat Islam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Mahmassani, Subhi. 1981. *Falsafah al-Tasyrî' fî al-Islâm*, terj. Ahmad Sudjono, *Filsafat Hukum dalam Islam* Cet. 2; Bandung: PT. al-Ma'arif, 1981
- Muhammad, Rusjdi Ali. 2003. *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi* Jakarta: logos Wacana Ilmu.
- Shihab, Umar. 1993. *Al-Qur'an dan Kekenyalan Hukum* Cet. 1; Semarang: PT. Dina Utama.
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syariat Islam dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Syah, M. Kaoy dan Lukman Hakeim. 2000. *Keistemewaan Aceh dalam Lintasan Sejarah* Jakarta: Pengurus Besar al-jami'iyatul Washliyah.